

## **BAB III**

### **ISU - ISU STRATEGIS**

#### **BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN**

Permasalahan pokok pendidikan di Kabupaten Probolinggo berdasarkan evaluasi Rencana Strategis ( Renstra ) Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo yang lalu adalah sebagai berikut :

##### **a. Pemerataan dan Perluasan Pendidikan**

Pemerataan berdasarkan beberapa indikator yaitu APK (Angka Partisipasi Kasar), APM (Angka Partisipasi Murni), perbandingan antar jenjang, rasio pendidikan, angka melanjutkan, dan tingkat pelayanan sekolah. Berdasarkan APK, maka angka yang tertinggi adalah pada jenjang SD/MI, dilanjutkan SLTP/MTs dan pemerataannya yang paling rendah adalah pada jenjang SM/MA.

##### **Permasalahan :**

- 1) Bila pemerataan dilihat menurut jender di tingkat SD/MI, SLTP/MTs dan SM/MA, maka pada jenjang tersebut terlihat perbedaan jender . Pada jenjang SLTP/MTs dan SD/MI jumlah laki-laki lebih banyak dari perempuan sedangkan pada jenjang SM/MA jumlah siswa perempuan lebih banyak.
- 2) Sesuai dengan besarnya APK (Angka Partisipasi Kasar), maka besarnya APM (Angka Partisipasi Murni) juga mengikuti. Makin tinggi jenjang pendidikan makin rendah nilai APM nya.
- 3) Bila dilihat perbandingan antar jenjang, maka masih terjadi ketimpangan antara sekolah tingkat SD/MI dengan tingkat SLTP/MTs apalagi untuk tingkat SM/MA. Namun jika dilihat dari jumlah siswa yang ada maka siswa SD/MI dapat tertampung di tingkat SLTP/MTs dengan menambah rombongan belajar dan ruang kelas di tingkat SLTP/MTs maupun di SM/MA.

- 4) Penggunaan ruang kelas yang paling rendah adalah jenjang sekolah dasar sebesar 49,32% yang berarti belum didayagunakan secara maksimal.
- 5) Keadaan Perpustakaan di Kabupaten Probolinggo pada kenyataannya juga sangat bervariasi dari 28,50 % di jenjang SD sampai 63,98% di jenjang sekolah menengah. Untuk jenjang SD terdapat 71,50 % sekolah belum memiliki perpustakaan. Pada jenjang SMP terdapat 49,03 % sekolah belum memiliki perpustakaan dan SM terdapat 36,02% sekolah belum memiliki perpustakaan sehingga dikdasmen yang belum mempunyai perpustakaan 62,64 %.
- 6) Keadaan Ruang UKS di Kabupaten Probolinggo pada kenyataannya juga sangat rendah untuk jenjang SD terdapat 76,81% sekolah belum memiliki ruang UKS. Pada jenjang SMP terdapat 59,05 % sekolah belum memiliki ruang UKS dan SM terdapat 65,84 % sekolah belum memiliki ruang UKS sehingga dikdasmen yang belum mempunyai ruang UKS 75,59%.
- 7) Untuk jenjang SD terdapat 86, 57% sekolah belum memiliki ruang komputer. Pada jenjang SMP terdapat 52,92 % sekolah belum memiliki ruang komputer dan SM terdapat 34,16 % sekolah belum memiliki ruang komputer sehingga dikdasmen yang belum mempunyai ruang komputer 73,38 %.
- 8) Indikator tentang angka melanjutkan menunjukkan angka yang paling besar pada jenjang SM/MA Diharapkan jika jumlah tingkat SM/MA ditingkatkan maka angka melanjutkan juga akan meningkat.
- 9) Kinerja pendidikan menurut jenjang pendidikan menunjukkan bahwa untuk dikdasmen tercapai sebesar 72,10 termasuk kategori KURANG.
- 10) Masih tingginya Angka Buta Aksara
- 11) Masih rendahnya jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan
- 12) Masih ada desa yang masih belum memiliki PAUD
- 13) Masih rendahnya kualifikasi pendidikan tenaga pendidik/Guru PAUD
- 14) Masih rendahnya prestasi siswa.

**Penyebab :**

- 1) Struktur Organisasi belum meng-akomodasi kebutuhan riil dilapangan.
- 2) Terjadinya penurunan jumlah sasaran didik di SM/MA
- 3) Tingginya minat masyarakat di dalam dan luar Kabupaten Probolinggo terhadap sekolah. Kualitas dan kuantitas sarana pembelajaran yang mendekati sesuai dengan standart pelayanan yang ditetapkan .
- 4) Penyebaran tenaga kependidikan secara kualitas dan kuantitas belum merata.
- 5) Perhitungan data di Badan Pusat Statistik, masih menggunakan sistem proyeksi, sehingga data penduduk usia sekolah belum valid.
- 6) Masih rendahnya tingkat pelayanan sekolah di tingkat SM/MA karena rendahnya jumlah sekolah di tingkat SM/MA.
- 7) Belum Maksimalnya Keterlibatan Mitra Organisasi Pemberantasan Buta Aksara
- 8) Pemahaman tentang pentingnya pendidikan PAUD dan Pendidikan Kursus dan Pelatihan di masyarakat masih kurang.
- 9) Pemahaman terhadap Pendidikan Inklusi masih rendah.

**b. Peningkatan Mutu**

Peningkatan berdasar berbagai indikator yaitu persentase lulusan TK/RA/BA, angka mengulang, angka putus sekolah , angka lulusan, angka kelayakan guru mengajar, persentase kondisi ruang kelas, persentase fasilitas sekolah, angka partisipasi dari biaya dan satuan biaya sekolah. Khusus untuk SLTP dan SM ditambah dengan indikator kesesuaian guru mengajar menurut bidang studi.

**Permasalahan :**

- 1) Angka putus sekolah besar disemua jenjang dengan demikian dapat dikatakan bahwa Tk. SD/MI, SLTP/MTs dan SM/MA perlu ditangani lebih lanjut karena memiliki nilai yang negatif pada angka mengulang, angka putus maupun angka kelulusan yang berarti mutunya perlu ditingkatkan
- 2) Kelayakan dan kualifikasi mengajar bagi tenaga pendidik masih perlu peningkatan.

- 3) Masih rendahnya Prosentase Kepala sekolah yang melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik.
- 4) Pelestarian seni budaya daerah (local genius) di lingkungan sekolah masih rendah.
- 5) Belum tersedianya Wadah kreasi dan inovasi peserta didik dan pendidik dalam bentuk ekspresi kesenian
- 6) Masih sedikitnya sarana dan prasarana perpustakaan khususnya di sekolah dasar
- 7) Masih sedikitnya sarana dan prasarana olah raga di sekolah

**Penyebab:**

- 1) Rata-rata input pada sekolah swasta dibawah rata-rata input sekolah negeri, dan rendahnya motivasi yayasan penyelenggara pendidikan untuk meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan
- 2) Alokasi Pembiayaan terbatas
- 3) Masih banyaknya tenaga pendidik yang belum memiliki sertifikat pendidik.
- 4) Masih rendahnya Kemampuan Guru Bidang Studi Seni Budaya Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
- 5) Beban kurikulum terlalu padat, kegiatan ekstra kurikuler kurang maksimal.

**c. Efisiensi Eksternal**

Efisiensi internal diukur dari jumlah keluaran, tahun-siswa, putus sekolah, mengulang, lama belajar, siswa terbuang, tahun masukan perlulusan dan rasio keluaran / masukan.

**Permasalahan :**

- 1) Berdasarkan jumlah keluaran ternyata yang paling tinggi adalah pendidikan dasar dan paling rendah adalah SM/MA.
- 2) Dari tahun siswa yang terbuang paling tinggi pada tk. SD/MI dan paling rendah pada tingkat SMA/MA.

- 3) Jumlah putus sekolah yang seharusnya 0 yang berarti sangat efisien, ternyata yang paling mendekati adalah tk. SM/MA, sedangkan mengulang yang paling mendekati / rendah di tingkat SM/MA.
- 4) Bila dilihat dari lama belajar lulusan, maka tk SD/MI memiliki lama belajar yang paling tidak efisien.
- 5) Dalam kaitan dengan tahun siswa terbuang, ternyata yang terbesar pada tk. SD/MI dan terendah pada tingkat SMP/MTs.
- 6) Bila dikaitkan dengan satuan biaya, maka pada Bidang Dikmen yang paling boros biayanya sedangkan yang paling tidak boros pada tk. SD/MI.
- 7) Belum optimalnya peran komite sekolah dan Dewan Pendidikan dalam memberikan kontribusi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan di masing-masing jenjang pendidikan.
- 8) Prioritas kegiatan yang direncanakan belum seluruhnya dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
- 9) Hasil evaluasi, pembinaan dan pengawasan aparatur pemerintah belum di tindaklanjuti secara maksimal.

**Penyebab:**

- 1) Belum dijalankannya fungsi dan peran Komite sekolah, Dewan Pendidikan secara maksimal.
- 2) Ada perbedaan penafsiran dalam penetapan prioritas pembangunan pendidikan antara Tim Penyusunan Anggaran dengan Penyusunan Program.

Berikut ini capaian umum tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan di Kabupaten Probolinggo antara lain :

- a. Adanya konsistensi dan kesinambungan upaya peningkatan untuk menuntaskan wajar dikdas 9 tahun dan 12 tahun melalui gerakan nasional oleh pemerintah dan masyarakat;
- b. Adanya peningkatan upaya tentang penyelenggaraan administrasi yang semakin terbuka dan peningkatan kualitas pelayanan publik;

- c. Tersedianya dana yang bersumber dari APBD, DAU maupun APBN dana dekonsentrasi memungkinkan kegiatan Dinas Pendidikan dapat diselenggarakan sesuai dengan rencana;
- d. Tersedianya fasilitas prasarana pendidikan yang tersebar di Kabupaten Probolinggo;
- e. Tersedianya tenaga kependidikan, baik pada jalur sekolah maupun luar sekolah;
- f. Ketersediaan SDM pada Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo yang relatif cukup;
- g. Terprogram dan terlaksananya PLS (Pendidikan Luar Sekolah) yang berorientasi pada aspek life skill dan atau kecakapan hidup sebagai bekal bermasyarakat;
- h. Telah melembaganya program-program PLS yang diprakarsai masyarakat a.l Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Kursus, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dll;
- i. Terselenggaranya pembelajaran berbasis kompetensi dan sertifikasi/uji kompetensi bagi siswa SMK sehingga dapat mendorong siswa memiliki kompetensi dan siap untuk bekerja;
- j. Semakin meningkatnya animo masyarakat masuk ke SMK dan bertambahnya jumlah SMK di Kabupaten Probolinggo;
- k. Diberlakukannya pembelajaran yang berorientasi kecakapan hidup berdasarkan pendekatan broad based education serta MPMBS;
- l. Diberlakukannya kurikulum 2004 dan KTSP;
- m. Terencananya jaringan teknologi komunikasi dan informasi untuk pengembangan model pendidikan di masa depan.

### 3.2 TELAAH VISI, MISI, DAN PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PROBOLINGGO

Dalam periode Tahun 2013-2018, Visi Pembangunan Kabupaten Probolinggo adalah ***“Terwujudnya Kabupaten Probolinggo yang Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berwawasan Lingkungan dan Berakhlak Mulia.”*** Sehingga diharapkan seluruh stakeholder di Kabupaten Probolinggo bahu

membahu mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk meningkatkan dan mewujudkan seluruh masyarakat Kabupaten Probolinggo lebih sejahtera, berkeadilan, mandiri, berwawasan lingkungan dan berakhlak mulia.

Secara filosofi visi Pembangunan Kabupaten Probolinggo tersebut dapat dijelaskan melalui makna didalamnya yang dapat diartikan bahwa dalam rangka mencapai tujuan umum pembangunan Kabupaten Probolinggo yaitu masyarakat yang berdaya saing tinggi. sebagai upaya dalam mewujudkan visi, maka misi Kabupaten Probolinggo sebagai berikut:

1. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing daerah, pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan, dan optimalisasi pengelolaan sumber daya berkelanjutan.
2. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia melalui peningkatan kualitas pelaksanaan otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Probolinggo, pembangunan pendidikan seperti tertuang dalam misi ke-2 yang berbunyi “Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia melalui peningkatan kualitas pelaksanaan otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih” Sehingga pada Renstra Dinas Pendidikan tahun 2013 – 2018 disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Probolinggo yang berakhlak mulia melalui peningkatan layanan pendidikan yang berkualitas dan berkarakter.

### **3.3 TELAAHAN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN DAN RENSTRA KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**

Strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan tahun 2010--2014 dirumuskan berdasarkan pada visi, misi, tujuan strategis Kemdiknas, serta mengacu pada RPJMN 2010--2014 dan evaluasi capaian pembangunan pendidikan sampai tahun 2009. Strategi dan arah kebijakan ini juga memperhatikan komitmen pemerintah terhadap konvensi internasional mengenai pendidikan, khususnya Konvensi Dakar tentang Pendidikan untuk Semua (*Education for All*), Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of Child*),

Millenium Development Goals (MDGs), dan *World Summit on Sustainable Development*.

Di dalam Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Sebagai sebuah system. pendidikan nasional membina dan mengembangkan subsistem pendidikan formal, nonformal, dan informal memiliki target dalam periode 5 (lima) tahunan sebagai berikut :

Tahun 2005 – 2010	Peningkatan Kapasitas dan Modernisasi
Tahun 2010 – 2015	Penguatan Pelayanan
Tahun 2015 – 2020	Daya Saing Regional
Tahun 2020 – 2040	Daya Saing Internasional

Sedangkan Visi renstra Kementerian Pendidikan dan kebudayaan adalah “Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan dan Kebudayaan untuk Membentuk Insan Indonesia yang Cerdas dan Beradab”. Visi ini diterjemahkan ke dalam misi meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan dan kebudayaan, memperluas keterjangkauan layanan pendidikan, meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kebudayaan, mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh layanan, menjamin kepastian/keterjaminan memperoleh layanan pendidikan dan mewujudkan kelestarian dan memperkuat kebudayaan indonesia.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan Nasional tahun 2010--2014 disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggara pendidikan di pusat dan daerah terkait dengan cara-cara yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang menggambarkan tujuan-tujuan strategis. Telaah terhadap sasaran-sasaran strategis akan terlihat adanya jumlah komponen yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan layanan pendidikan nasional. Kebutuhan tersebut mencakup pendidik dan tenaga kependidikan, pembelajaran dan penilaian, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola.

visi dan misi tersebut dapat terwujud apabila didukung dengan penerapan tata nilai yang sesuai dan mendukung usaha-usaha pelaksanaan misi

dan pencapaian visi. Tata nilai merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan perilaku seluruh pegawai dalam menjalankan tugas. Tata nilai juga akan menyatukan hati dan pikiran seluruh pegawai dalam usaha mewujudkan layanan prima pendidikan. Tata nilai yang dimaksud adalah amanah, profesional, visioner, demokratis, inklusif, dan berkeadilan

### **3.4 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Pembangunan pendidikan di Kabupaten Probolinggo yang mengacu pada renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo tahun 2008 – 2013, berbagai masalah yang masih belum terselesaikan, sehingga dapat diidentifikasi untuk menentukan isu – isu strategis pendidikan di Kabupaten Probolinggo.

Identifikasi isu – isu strategis juga didasarkan pada perkembangan dan berbagai fenomena yang berlangsung di dunia pendidikan, serta arah yang hendak dilaksanakan untuk mencapai visi pendidikan dalam renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo periode 2013 – 2018, antara lain :

1. Disparitas pemerataan dan kualitas pendidikan antar kecamatan.
2. Tugas dan Fungsi UPTD Sesuai Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo
3. Kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
4. Tugas dan fungsi pengawasan
5. Peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan
6. Regulasi di bidang pendidikan berupa penetapan peraturan daerah Kabupaten Probolinggo tentang pendidikan
7. Pengembangan dan implementasi kurikulum muatan lokal utamanya pendidikan kejujuran dan pelestarian budaya di sekolah
8. APK PAUD yang masih rendah
9. Masih rendahnya tingkat pendidikan tenaga pendidik PAUD.
10. Kualitas pendidikan nonformal dan informal
11. Literasi Minat baca bagi masyarakat
12. Penerapan TIK dalam Pembelajaran
13. Dokumentasi dan publikasi layanan pendidikan

14. Sistem informasi manajemen layanan pendidikan
15. Sistem pengendalian manajemen Pendidikan
16. Layanan data dan informasi pendidikan
17. Implementasi program peningkatan kualitas pendidikan menengah universal
18. Implementasi kurikulum 2013 pada berbagai jenjang dan jalur pendidikan
19. Formulasi untuk mengembangkan sekolah unggulan
20. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan dan pengembangannya
21. Rasionalisasi dan pemerataan tenaga kependidikan
22. Sistem Monitoring, Evaluasi, dan Informasi yang terpadu